505106L08AL Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi



Model Pembangunan Sosial : Pengentasan Kemiskinan Berazas Spiritual	1-13
Eksploitasi Pasir Besi dan Dampak Lingkungan Sosial, Budaya, Ekonomi Pada Masyarakat di Pesisir Pantai Selatan Jawa Barat	14-32
Pengembangan Wisata Kopi Berbasis Masyarakat di Desa Warjabakti Kabupaten Bandung	33-48
Peran Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Dalam Menopang Pembangunan di Indonesia	49-67
Model Pengembangan Desa Wisata (Studi Komparatif Desa Jayagiri, Kecamatan Lembang dan Desa Sarongge, Kecamatan Pacet)	68-81
Melampaui Postmodernisme: Kajian Teoritis Terhadap Pemikiran Robert Samuels Tentang <i>Automodernity</i>	82-100

Diterbitkan oleh :

Departemen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran

Jl. Raya Bandung Sumedang, Km. 21, Sumedang 45363 Telp. (022) 7796416/7798418 Ext. 142 FAX (022) 7796974 e-mail : jurnal.sosioglobal@gmail.com



ISSN 2548-4559 (versi online) ISSN 2541-3988 (versi cetak)

50510GL0BAL Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi



Volume I Nomor I Desember 2016

SOSIOGLOBAL adalah jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Departemen Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran. Jurnal SOSIOGLOBAL mempublikasikan hasil pemikiran serta penelitian di bidang Sosiologi. Terbit dua kali dalam setahun yaitu bulan Desember dan Juni

Penanggung Jawab : Kepala Departemen Sosiologi

Pimpinan Redaksi : M.Fadhil Nurdin, MA., Ph.D

Wakil Pimpinan Redaksi : Dr. Drs. Wahyu Gunawan, M.Si

Budi Sutrisno, S.Sos., M.Si

Dewan Redaksi : Dr. Bintarsih Sekarningrum, M.Si

R.A Tachya Muhamad, M.Si

Yusar, S.Sos., M.Si Desi Yunita, S.Sos., M.Si

Mitra Bestari : Prof. Azlinda Azman, Ph.D, USM, Malaysia

Bala Raju Nikku, Ph.D, Purbanchal University, Nepal Huda Abdulaziz, Ph.D, Princess Nourah bin Abdul Rahman

University, Saudi Arabia

Dr. Ary Bainus, M.A., Universitas Padjadjaran, Indonesia

Alamat Redaksi:

Kampus FISIP Unpad Gd. C Lt.1 Jl. Raya Bandung-Sumedang Km.21

Telp/Fax : (022) 7796416/7798418 Ext. 142 - Fax (022) 7796974

Email : jurnal.sosioglobal@gmail.com Website : http://jurnal.unpad.ac.id/sosioglobal

Percetakan : Unpad Press Pertama Terbit : Desember 2016

Frekwensi Terbit: Dua kali setahun, setiap bulan Desember dan Juni

PENGANTAR REDAKSI

Jurnal Sosioglobal diterbitkan oleh Pusat Studi Kemasyarakatan dan Pembangunan (Centre for Social and Development Studies) Departemen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Padjadjaran. Jurnal ini secara normal terbit dua kali setahun dan menerbitkan edisi khusus (special issues) sekali setahun dengan menerima tulisan dari pelbagai kalangan ilmuan, akademisi maupun praktisi bidang sosial dan politik dari seluruh Indonesia maupun Malaysia.

Dalam jurnal edisi pertama ini menampilkan 6 makalah berbahasa Indonesia; dan sebuah tulisan berbahasa Malaysia. Model Pembangunan Sosial: Pengentasan Kemiskinan Berazas Spiritual, Model Pengembangan Desa Wisata (Studi Komparatif Desa Jayagiri Kecamatan Lembang dan Desa Sarongge Kecamatan Pacet, Eksploitasi Pasir Besi dan Dampak Lingkungan Sosial Budaya, Ekonomi pada Masyarakat di Pesisir Pantai Selatan Jawa Barat, Pengembangan Wisata Kopi Berbasis Masyarakat Di Desa Warjabakti Kabupaten Bandung, Peran Organisasi Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam Menopang Pembangunan di Indonesia. Selain itu, terdapat makalah kajian teoritis, yaitu: Melampaui Postmodernism: Kajian Teoritis terhadap Pemikiran Robert Samuels tentang *Automodernity*, dan tulisan terakhir, Model dan Fungsi Kesejahteraan Sosial-berdasarkan kolaborasi Departemen Sosiologi Fisip Unpad dengan School of Social Sciences Universiti Sains Malaysia.

Makalah-makalah tersebut telah melalui proses penilaian sewajarnya sesuai kaidah dan prosedur ilmiah di dunia akademik.

Bandung, Januari 2017 Ketua Dewan Penyunting

Muhamad Fadhil Nurdin, MA., Ph.D

ISSN 2548-4559 (versi online) ISSN 2541-3988 (versi cetak)

50510GL0BAL Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi



Volume I Nomor I Desember 2016

DAFTAR ISI

Pengantar Redaksi	Hal
Model Pembangunan Sosial : Pengentasan Kemiskinan Berazas Spiritual M. Fadhil Nurdin	1-13
Eksploitasi Pasir Besi dan Dampak Lingkungan Sosial, Budaya, Ekonomi Pada Masyarakat di Pesisir Pantai Selatan Jawa Barat	
Desi Yunita, Risdiana, Wahyu Gunawan, Caroline Paskarina, Budi Sutrisno	14-32
Pengembangan Wisata Kopi Berbasis Masyarakat di Desa Warjabakti Kabupaten Bandung	
Wahju Gunawan, Desi Yunita, Saifullah Zakaria	33-48
Peran Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Dalam Menopang Pembangunan di Indonesia	
Ari Ganjar Herdiansah, Randi	49-67
Model Pengembangan Desa Wisata (Studi Komparatif Desa Jayagiri, Kecamatan Lembang dan Desa Sarongge, Kecamatan Pacet)	
Budi Sutrisno, R.A Tachya Muhamad	68-81
Melampaui Postmodernisme : Kajian Teoritis Terhadap Pemikiran Robert Samuels Tentang <i>Automodernity</i>	
I Gusti Made Arya Suta Wirawan	82-100

PERAN ORGANISASI MASYARAKAT (ORMAS) DAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (LSM) DALAM MENOPANG PEMBANGUNAN DI INDONESIA

Ari Ganjar Herdiansah, Randi

Universitas Padjadjaran ari.ganjar@unpad.ac.id

ABSTRAK

Tulisan ini menguraikan tentang tinjauan kritis peran Organisasi masyarakat (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam menopang pembangunan di Indonesia. Ormas dan LSM merupakan perwujudan dari berlangsungnya masyarakat sipil yang berfungsi menjembatani, memperjuangkan, dan membela kepentingan rakyat dari dominasi kepentingan modal dan politik praktis. Dengan kekuatan kolektivitas, kemampuan, dan pengorganisasian massa, Ormas dan LSM berfungsi mengawasi dan terlibat dalam kebijakan-kebijakan atau program-program pembangunan demi kepentingan publik. Di samping itu, Ormas dan LSM juga memiliki fungsi menjaga stabilitas politik dan sosial. Mereka menengahi berbagai kepentingan yang terjadi di antara kelompok masyarakat sehingga dapat meminimalisir potensi konflik sosial. Namun demikian, pada praktiknya kondisi sosial ekonomi di Indonesia yang masih rendah telah memaksa beberapa pihak menggunakan Ormas dan LSM untuk meraih kepentingan mereka. Karena itu, memperbaiki dan meluruskan kembali peran Ormas dan LMS merupakan tantangan untuk memperkuat peran mereka dalam rangka turut menciptakan pembangunan dan demokrasi yang lebih baik.

ABSTRACT

This paper scrutinizes the role of Organisasi Masyarakat (Ormas) and Lembaga Swadaya Masyarakat (Non-Governmental Organization, NGO/LSM) to support the development in Indonesia. Ormas and LSM are a manifestation of the ongoing civil society that serves to bridge, courage, and defends the interests of the people from the domination of capital and the practical political interests. With the power of collectivity, abilities, and organizing the masses, Ormas and LSM functioning oversee and participate in the policies or development programs in the public interest. Also, Ormas and LSM also have the function of maintaining political and social stability. They mediate the various benefits that occur among groups of people so as to minimize the potential for social conflict. However, in practice, the socio-economic condition in Indonesia have forced some parties using Ormas and LSM to achieve their vested interests. Therefore, realign the role of Ormas and LSM is a challenge to strengthen their position to participate in creating a better development and democracy.

Keywords: civil organizations, NGOs, democracy, development, civil society

PENDAHULUAN

Organisasi masyarakat (ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau dalam istilah lainnya sebagai Non-Governmental Organization (NGO) memegang peranan penting sebagai pilar demokrasi yang mewujudkan masyarakat sipil (civil society) yang kuat dan mampu memperjuangkan hak-hak rakyat dalam kehidupan bernegara. Ormas dan LSM merupakan organisasi yang didirikan oleh individu atau kelompok secara sukarela yang bertujuan untuk mendukung dan menopang aktivitas atau kepentingan publik tanpa bermaksud mengambil keuntungan finansial. Ormas dan LSM merupakan organisasi legal di mata hukum yang bekerja tanpa adanya ketergantungan dari pemerintah, atau setidaknya pengaruh dari pemerintah tidak diberikan secara langsung. Pada kasus dimana Ormas dan LSM mendapatkan dana dari pemerintah, tetap tidak boleh ada keanggotaan LSM tersebut dari unsur pemerintah. Ada beberapa jenis organisasi yang terbentuk antara lain LSM, yayasan sosial, organisasi keagamaan, organisasi Kepemudaan, dan organisasi yang didasarkan atas profesi.

Di Indonesia, keberlangsungan Ormas dan LSM telah diatur dalam konstitusi dan sistem perundang-undangan. Dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945, terdapat suatu jaminan bagi seluruh warga negara Indonesia untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan dan sebagainya. Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara. Setiap orang memiliki hak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Maksud dari kebebasan berserikat dan berkumpul berdasarkan UUD 1945 antara lain membentuk koperasi sebagai sarana peningkatan kesejahteraan ekonomi, membentuk badan usaha, lembaga amal atau yayasan, partai politik, dan organisasi masyarakat. Namun demikian, kebebasan berserikat, berkumpul, dan berpendapat tetaplah harus merujuk pada asas Indonesia sebagai negara hukum. Artinya, bentuk-bentuk institusi dan organisasi yang ada harus tunduk dan patuh pada konstitusi, sistem hukum, dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Keberadaan ormas dan LSM telah diatur oleh Intruksi Menteri Dalam Negeri (Inmedagri) No. 8 tahun 1990, pengertian LSM dalam Instruksi ini adalah organisasi/lembaga yang dibentuk oleh warga negara Indonesia secara sukarela atas kehendak sendiri yang berminat serta bergerak di bidang kegiatan tertentu sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Sementara Ormas, menurut Undang-Undang No.17 tahun 2013 pasal 1 ayat 1, adalah organisasi yang

didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela atas dasar kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila. Secara ideal, Ormas atau LSM adalah organisasi yang muncul dari masyarakat yang tentunya memperjuangkan hak-hak masyarakat sebagai alternatif pembangunan (Fakih 2000). Pembentukan ormas maupun LSM merupakan wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat yang menitik beratkan kepada pengabdian secara swadaya. Kemunculan Orma/LSM tidak terlepas dari kepentingan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan melakukan perubahan sosial bagi masyarakat itu sendiri, dimana aspek kesejahteraan tersebut tidak dapat dipenuhi hanya dari unsur pemerintah.

Setelah Orde Baru tumbang akibat tuntutan demokratisasi, terjadi perubahan paradigma dalam dinamika sosial politik dari yang berbasis elit menjadi berbasis masyarakat. Pemerintahan yang pada mulanya bersifat sentralistik, dengan diberlakukannya UU No 22/1999 dan kemudian UU No. 32/2004, berubah menjadi sistem pemerintahan yang desentralistik dengan tujuan untuk lebih mengakomodir aspirasi dan mengembangkan daerah sesuai dengan potensi sosial ekonomi dan budaya setempat. Di sisi lain, di dalam tuntutan demokratisasi terkandung tuntutan supaya pemerintahan dijalankan dengan prinsip-prinsip akuntabilitas, partisipasi, transparansi, dan anti korupsi. Pemerintah harus menjamin proses pembangunan benar-benar memberikan manfaat bagi rakyat dan dilaksanakan secara profesional. Karena itu, dalam rangka turut menciptakan pemerintahan yang menjalankan program pembangunan yang menyasar pada terpenuhinya kepentingankepentingan publik, elemen-elemen masyarakat turut berpartisipasi baik melalui mekanisme pengawasan informal maupun dengan menjalin kerjasama kemitraan dengan pemerintah. Pola kemitraan antara organisasi sipil dan pemerintah dalam menopang pembangunan semakin dikuatkan. Hal tersebut mencerminkan berlangsungnya sistem pemerintahan yang demokratis dan memprioritaskan kepentingan rakyat.

Dengan demikian, di era demokrasi baru ini, Ormas dan LSM mempunyai fungsi strategis sebagai pelopor yang melayani perubahan sosial dalam penguatan ranah sipil (Assa'di et al. 2009). Menurut Undang-Undang No.17 tahun 2013 pasal 6, dikatakan bahwa ormas berfungsi sebagai sarana:

- a. Penyalur kegiatan sesuai dengan kepentingan anggota dan/atau tujuan organisasi
- b. Pembinaan dan pengembangan anggota untuk mewujudkan tujuan organisasi
- c. Penyalur aspirasi masyarakat
- d. Pemberdayaan masyarakat
- e. Pemenuhan pelayanan sosial
- f. Partisipasi masyarakat untuk memelihara, menjaga, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa
- g. Pemelihara dan pelestari norma, nilai, dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Dengan fungsi tersebut, Ormas dan LSM bebas melakukan atau membuat program sendiri dengan tujuan untuk kesejahteraan masyarakat dan tidak terlepas dari nilai-nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Namun, Ormas dan LSM merupakan bagian dari bentuk masyarakat sipil yang bersifat independen dan mengutamakan kepentingan publik. Kedua lembaga tersebut merupakan kumpulan dari organisasi-organisasi atau institusi-institusi yang menyuarakan kepentingan rakyat. Karakteristik utama masyarakat sipil adalah di ranahnya yang berada antara keluarga dan negara, menikmati otonomi dari negara dan digerakkan oleh kesukarelawanan dari para anggota masyarakat (White 1994). Dalam sistem politik yang demokratis, masyarakat sipil menjadi unsur yang penting karena menyediakan wahana untuk mengartikulasikan dan memperjuangkan kepentingan rakyat berhadapan dengan negara dan pemerintah yang cenderung dipengaruhi oleh kekuatan pasar dan elite-elite politik. Masyarakat sipil berupaya untuk memelihara atau menguatkan nilai-nilai utama dalam kehidupan sosial.

Dalam konteks Indonesia, kebangkitan masyarakat sipil akhir-akhir ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain (1) pertumbuhan ekonomi yang meningkat terutama pada era Orde Baru, (2) kemunculan kelas menengah (3) kebangkitan gerakan-gerakan pertentangan terhadap rezim Orde Baru, dan (4) meningkatnya tuntutan demokratisasi. Keempat faktor tersebut juga turut didorong oleh globalisasi ekonomi dan penggunaan teknologi informasi yang pesat (Mitsuo 2001). Beberapa organisasi sipil yang dikenal di Indonesia antara lain: ormas seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah yang merupakan terbesar di Indonesia, organisasi profesi yang berupa sekumpulan individu yang bergabung berdasarkan kesamaan profesi seperti Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), organisasi akar rumput (grass root) yang biasanya berupa organisasi sayap yang

merepresentasikan kelompok akar rumput atau bukan elite, dan LSM yang saati ini jumlahnya ribuan organisasi.

Di era Orde Baru, organisasi non-pemerintah diistilahkan sebagai organisasi non pemerintah (Ornop). Tetapi, penggunaan istilah Onrop tidak lagi diteruskan karena memberi kesan seolah-olah merupakan organisasi tandingan bagi pemerintah. Pada tahun 1982, organisasi kemasyarakatan baik LSM maupun LPSM disebut dengan satu istilah yaitu LSM saja. Karakteristik khusus LSM dalam mengemban visi dan misinya antar lain:

- a. Memfokuskan pada kebutuhan masyarakat bawah dan berimplikasi terhadap kebutuhan organisasi dalam penyaluran informasi dan pemberdayaan masyarakat.
- b. Meningkatkan partisipasi warga bagi kelompok sasaran dalam proses pencapaian tujuan program, yaitu kemajuan dan pemberdayaan.
- c. Memperkenalkan inovasi yang bermanfaat dan memecahkan masalah kelompok sasaran dengan biaya ringan dan mudah untuk adaptasi, sesuai kondisi kelompok sasaran.
- d. Memiliki skala program terbatas atau kecil untuk mempermudah pemantauan, pencapaian, dan ketepatan sasaran.
- e. Memiliki komitmen tinggi untuk merealisasikan idealisme untuk memberdayakan dan membantu kelompok sasaran yang miskin.
- f. Menghadirkan transparansi dalam penggunaan biaya bebas dari kemungkinan tindakan korupsi (Bastian 2007).

Sebagai bagian dari masyarakat sipil, LSM diharapkan dapat mendorong perubahan sosial melalui pemberdayaan komunitas (community empowering), penguatan arus bawah dan peningkatan pendapatan. Fokus kinerja LSM adalah melakukan perubahan sosial dengan menciptakan kesadaran masyarakat sipil melalui penataan organisasi dan metode secara bersama-sama. Keberadaan LSM ditandai dengan intensitas interaksi antaranggota dengan anggota masyarakat secara langsung, bahkan pada batasan tertentu telah mengambil alih peran negara yaitu menyediakan layanan kesehatan, mengadvokasi pendidikan, menggalang partisipasi masyarakat dan sebagainya (Nurman 2012). LSM dapat berperan sebagai mediator atau menjembatani jarak antara masyarakat dengan struktur negara baik di tingkat pusat maupun daerah, tetapi dengan catatan tidak larut dalam mainstream negara (Bastian 2007).

METODE PENELITIAN

Tulisan ini dibangun dengan berdasarkan suatu kajian literatur. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yaitu berupa dokumen, Undang-Undang, arsip, artikel, dan buku yang berkaitan langsung dengan peran organisasi masyarakat (ORMAS) dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) khususnya dalam konteks bagaimana mereka berpartisipasi pada pembangunan di Indonesia.

KERANGKA TEORI/KONSEP

Konsep Ormas dan LSM menurut ilmuan (Holloway 1997) bahwa bentuk organisasi yang memperhatikan kepentingan masyarakat yang secara mandiri dan bukan untuk mencari keuntungan atau organisasi yang memberikan manfaat kepada masyarakat. Sedangkan masyarakat sipil (Holloway 1997) adalah suatu pergerakan sosial dari lapisan masyarakat yang terorganisir dimana menghadirkan banyak orang yang berbeda dan terkadang berlawanan. Menurut (Fowler 1997) yang mengklarifikasi tentang perbedaan antara Ormas dan Non-Organisasi. Organisasi masyarakt sipil: tidak dibentuk untuk menjadi organisasi yang mapan, tidak harus dibutuhkan, tetapi sebagai pilihan masyarakat yang secara sukarela untuk membantu masyarakat dalam hokum, dibentuk oleh individu yang mandiri dan bukan bagian dari pemerintah ataupun dikendalikan oleh suatu badan publik, organisasi masyarakat sipil ini mematuhi aturan undang-undang, mendaftarkan diri kepada pemerintah, dan mengola sumber daya ormas, tercatat sebagai organisasi untuk pengenalan sosial dan menerima prinsip tanggung jawab social. Sedangkan NGOs (atau organisasi pengembangan dan kesejahteraan masyarakat) yaitu: suatu legitimasi di masyarakat yang lemah/miskin yaitu terjadi ketidakadilan dan mereka alami, melakukan aksi ketika adanya dukungan dan memberikan bantuan dana untuk masyarakat miskin**, s**ebagian besar anggota beroperasi atas berbagai yang secara parsial (sebagian datang dari pemerintah dan sector bisnis), didasarkan pada nilai-nilai sukarela

Ormas/LSM merupakan bagian dari masyarakat sipil yang menurut Mouzelis (Halili 2006) untuk turut menciptakan penegakan hukum yang efektif demi melindungi kepentingan masyarakat dari kesewenang-wenangan pemerintah. Kelompok-kelompok sipil yang dikelola secara kuat akan mampu melakukan pengawasan terhadap penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh orang yang memegang kontrol terhadap administrasi dan sarana-sarana pemaksa. Mereka menghadirkan keadaan pluralisme yang seimbang di antara kepentingan-kepentingan masyarakat sehingga tidak adanya peluang salah satu pihak untuk

mendominasi secara mutlak. Dari berbagai sudut pandang tersebut penulis melakukan kajian normatif dan kritis dalam membangun pengetahuan tentang bagaimana Ormas dan LSM berada di masyarakat yang akhirnya menjadi satu kekuatan dalam pembangunan di Indonesia.

HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Signifikansi Ormas dan LSM dalam Pembangunan

Sejak reformasi bergulir, pemerintah dan Ormas dan LSM semakin menunjukkan kinerja yang signifikan. Mereka saling bekerjasama untuk meraih tujuan-tujuan bersama. Keterlibatan Ormas dan LSM dalam program-program pemerintah semakin tinggi antara lain dalam pembangunan pembuatan keputusan dan program-program pemerintah lainnya. Sudah banyak Ormas dan LSM yang berhasil melanjutkan upayanya untuk meningkatkan efektivitas kerja sebagai mitra pemerintah, baik di tingkat nasional, regional dan kabupaten/kota. Karena itu, pendekatan kemitraan Ormas dan LSM dan pemerintah menjadi penting untuk menopang keberhasilan pembangunan di Indonesia.

Pilar demokrasi di Indonesia dalam pembangunan dibangun oleh tiga aktor, yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat. Ketiga aktor tersebut menjalin hubungan yang sinergis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Namun demikian, Ormas dan LSM perlu mengambil posisi sebagai mitra yang kritis terhadap pemerintah untuk lebih mengarahkan program-program pembangunan menuju sasaran yang telah ditetapkan dan memberikan maslahat bagi publik. Kerja sama antara Ormas dan LSM dan pemerintah jangan diartikan sebagai hubungan mutualisme yang memprioritaskan keuntungan finansial bagi aktoraktornya. Tetapi, kerja sama yang dimaksud ditujukan untuk membangun kebersamaan dalam mengkritisi kebijakan pemerintah yang dinilai kurang tepat dalam mensejahterakan masyarakat. Pemerintah pun perlu terbuka dalam menerima masukan dari Ormas/LSM sehingga antara pemerintah dan Ormas dan LSM dapat saling berdampingan demi kepentingan bangsa dan negara (UMY, 2016). Sesuai dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 pasal (21) ayat (b, d, dan f) dimana Ormas dan LSM berkewajiban menjaga persatuan bangsa, kedamaian dalam masyarakat dan turut berpartisipasi dalam pencapaian tujuan Negara. Dengan Undang-Undang tersebut satu keharusan pemerintah dan Ormas saling bersinergi dalam mencapai cita-cita bangsa.

Keunggulan Ormas dan LSM dalam menopang pembangunan dibentuk oleh karakteristik organisasi yang berbeda dengan organisasi di ranah pemerintah dan bisnis. Ormas dan

LSM dapat menyusun visi dan misi yang strategis sesuai dengan sasaran yang dapat mencapai tujuan-tujuan masyarakat. Kedudukannya yang relatif independen dan jauh dari intervensi pihak lain terutama pemerintah memungkinkan Ormas dan LSM untuk memaksimalkan integritas mereka dalam memperjuangkan tujuan-tujuannya. Ketika Ormas dan LSM mampu menjaga integritas dan independensinya, mereka akan mendapatkan kredibilitas sehingga lebih dipercaya dan diandalkan oleh publik. Karena Ormas dan LSM biasanya memiliki tujuan spesifik, mereka pun memiliki kompetensi dibandingkan dengan aparat pemerintah yang dibebani beragam tugas. Misalnya, Ormas dan LSM yang memperjuangkan hak-hak perempuan memiliki anggota-anggota yang memahami seluk beluk regulasi dan isu-isu perempuan. Dengan keahlian tersebut, masyarakat mempunyai posisi tawar yang strategis ketika berhadapan dengan kekuatan negara dan modal. Di samping itu, Ormas dan LSM dapat leluasa membangun jejaring organisasinya untuk mencapai tujuan mereka secara efektif dan efisien.

Peran Ormas dan LSM dalam pembangunan masyarakat antara lain pertama sebagai kreator pengetahuan. Ormas dan LSM dapat melakukan riset dan analisis yang hasilnya untuk memperkuat ataupun mengkritisi kebijakan yang ada. Hasil riset Ormas dan LSM pun dapat digunakan untuk kepentingan pemerintah. Kedua, LSM sebagai penyalur pengetahuan, artinya mereka berperan untuk menyalurkan informasi ilmiah dan teknis yang dihasilkan oleh para peneliti akademis dan pemerintah untuk memahami pembuat kebijakan, media, dan publik dalam rangka merumuskan rekomendasi pada penyusunan hukum peraturan, kebijakan dan inisiatif untuk merespons informasi. Ketiga, Ormas dan LSM dapat berperan sebagai entrepreneur kebijakan yang mewakili dan meningkatkan isuisu tertentu untuk menjadi perhatian dalam suatu proses kebijakan. Keempat, Ormas dan LSM dapat berperan sebagai kontributor dalam proses implementasi kebijakan dan penyediaan layanan publik. Kelima, Ormas dan LSM dapat menjadi penyedia utama informasi publik, pendidikan, motivasi, dan perhatian terhadap isu-isu seperti perdagangan internasional, pangan berkelanjutan, dan energi terbarukan. Di Indonesia, Ormas dan LSM berperan dan berfungsi dalam memelihara sistem politik demokratis dan menopang pembangunan. Mereka memiliki posisi penting dalam menguatkan kedudukan masyarakat sipil ketika berhadapan dengan negara yang seringkali dikendalikan oleh kekuatan modal dan elite-elite politik. Beberapa fungsi Ormas dan LSM terutama dalam pembangunan antara lain sebagai berikut:

Sebagai organisasi yang mengelola aspirasi masyarakat

Ormas dan LSM berperan sebagai wadah organisasi yang menampung, memproses, dan melaksanakan aspirasi masyarakat dalam bidang pembangunan, terutama pada bagian yang seringkali kurang diperhatikan oleh pemerintah. Ormas dan LSM dapat juga berperan sebagai wahana penyalur aspirasi hak dan kewajiban warga negara dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh masing-masing organisasi. Masyarakat dapat memberikan aspirasinya kepada Ormas dan LSM yang kemudian disalurkan kepada lembaga politik atau pemerintah yang bersangkutan guna mencapai keseimbangan komunikasi yang baik antara masyarakat dan pemerintahan.

Contoh dari peran ini diambil oleh LSM yang bergerak di bidang lingkungan, seperti Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), yang salah satu kontribusinya yaitu menerima ataupun mengumpulkan keluhan-keluhan dari masyarakat terkait permasalahan lingkungan di sekitar mereka. Keluhan-keluhan tersebut kemudian disampaikan kepada institusi terkait, misalnya Badan Pengelola Lingkungan Hidup (BPLH) sebagai instansi pemerintah. Pada proses ini, pemerintah mendapatkan asistensi dari LSM lingkungan dengan menerima informasi tentang keadaan masyarakat yang dirugikan akibat pengelolaan lingkungan yang tidak sesuai. Atas informasi dan aspirasi masyarakat yang didapatkan dari LSM tersebut, dinas pemerintahan yang bersangkutan dapat menindaklanjuti melalui kebijakan atau tindakan. Contoh tersebut memberikan gambaran tentang pola kemitraan LSM dan pemerintah dalam aspek pengelolaan aspirasi masyarakat.

Adapun contoh lain dalam skala besar yang bergerak dalam kemanusiaan yaitu perlindungan buruh migran Indonesia yaitu Gerakan Perempuan untuk Perlindungan Buruh Migran (GPPBM). Organisasi tersebut adalah koalisi dari beberapa organisasi perempuan yang peduli terhadap buruh migran Indonesia yang bergerak dalam politik internasional, di antaranya Kongres Wanita Indonesia (KOWANI), Solidaritas Perempuan, Fatayat NU, Perempuan Marhean, dan Perempuan Katolik. Ormas ini terbentuk untuk mewadahi aspirasi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di Arab Saudi dengan tujuan untuk memperkuat peran institusi pemerintah dalam menangani permasalahan TKI khususnya tenaga kerja perempuan. GPPBM menggagas empat point pembenahan dalam perlindungan buruh migran perempuan di Arab Saudi, point tersebut yaitu; 1) bilateral agreement, 2) draft kontrak kerja, 3) sosialisasi hak-hak buruh migran dan 4) kurikulum pelatihan (CARAM 2003). Banyaknya migran pekerja perempuan di Arab Saudi tidak memahami keberadaannya dan hak-haknya belum tersosialisasi dengan baik, sehingga tidak jarang tenaga kerja perempuan ini di eksploitasi atau mengalami kekerasan, pemerkosaan, bahkan pembunuhan. Atas dasar hal tersebut aliansi gerakan perempuan ini dibentuk, dan tidak terlepas bermitra dengan Kementrian Pemberdayaan Perempuan untuk kemudahan dalam mencapai tujuan bersama. Gerakan yang ditunjukkan oleh GBPPM menujukkan bahwa peran organisasi non pemerintah sangat penting dalam proses perlindungan masyarakat.

Sebagai organisasi yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat

Peran Ormas dan LSM yang terhitung paling mendasar adalah mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat, di mana dalam aspek ini pemerintah juga memiliki tujuan yang sama. Upaya ini khususnya dilakukan oleh Ormas dan LSM yang bergerak di bidang pembangunan ekonomi. Mereka berupaya untuk memberdayakan kesejahteraan ekonomi masyarakat miskin atau yang terpinggirkan dalam proses pembangunan. Misalnya Ormas dan LSM yang berusaha membuka peluang bagi petani dan wanita untuk keluar dari kemiskinan. Mereka berjuang untuk meningkatkan pendapatan orang-orang miskin dengan memobilisasi sumber daya dari pemerintah dan agensi-agensi pendanaan baik di dalam negeri maupun luar negeri (Bhose 2003).

Ormas dan LSM yang bergerak di bidang amal biasanya memberikan sesuatu berupa materi, seperti makanan, pakaian, dan kebutuhan pokok lainnya kepada masyarakat terutama kalangan bawah. Di pihak lain juga terdapat Ormas dan LSM yang bergerak di bidang penyediaan pelayanan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mereka biasanya melayani orang-orang miskin dan kaum marginal. Mereka menyediakan unit kesehatan bergerak, rumah sakit, sekolah, program pelatihan, edukasi non-formal, perpustakaan, dan sebagainya. Mereka menyediakan layanan-layanan tersebut dengan pengorbanan tinggi para anggotanya, efisiensi tinggi, ongkos yang rendah, dan dedikasi serta komitmen tinggi. Dalam konteks pembangunan, dari bidang tugas yang dilakukannya tersebut, dapat dilihat begitu besar peran Ormas dan LSM sebagai mitra pemerintah dalam pencapaian tujuan yang salah satunya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Contoh organisasi yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi Sosial (LP3ES) salah satu LSM yang terbentuk pada tahun1971. LP3ES adalah LSM yang yang bergerak di lingkup nasional yang bertujuan untuk mendengar aspirasi masyarakat dan melakukan serangkaian

penelitian, dan memberikan bantuan kepada masyarakat secara swadaya. Adapun rumusan kegiatan LP3ES yaitu; kegiatan amal yang memberi bantuan kepada masyarakat miskin, korban bencana alam, korban perang dan memberikan bantuan dana dan material kepada organisai sosial, organisasi keagamaan yang bergerak di masyarakat; LP3ES menginisiasikan kegiatan pada perubahan dan pembangunan (change and development), pengembangan dan pemberdayaan masyarakat (community development and community empowerment); kemudian LP3ES bergerak dalam pelayanan dan advokasi (Hadjar 2006). LP3ES tidak hanya melakukan penelitian dan memberikan bantuan, tetapi juga memberikan pelatihan pendidikan kepada masyarakat lapisan bawah, dengan tujuan untuk pencerdasan kehidupan masyarakat Indonesia.

Sebagai organisasi yang mendukung dan melaksanakan program pembangunan

Di samping fokus pada program-program peningkatan kesejahteraan masyarakat, juga banyak Ormas dan LSM yang mendukung pelaksanaan program pembangunan secara luas dan beragam. Misalnya Ormas dan LSM yang bergerak dibidang rehabilitasi dan pemulihan keadaan bencana, mereka berupaya memulihkan keadaan pasca bencana seperti banjir, kebakaran, dan penyakit menular atau bencana akibat ulah manusia seperti peperangan, genosida, dan lain sebagainya. Beberapa penyediaan layanan Ormas dan LSM kategori ini antara lain makanan, kesehatan, dan bantuan operasi penyelamatan.

Terdapat pula LSM yang bergerak membangun jejaring. Mereka menyediakan organisasi payung secara informal untuk mencakup LSM-LSM yang memiliki kesamaan tujuan atau isu yang diperhatikannya (seperti pengobatan berbasis kearifan lokal, penyalahgunaan narkoba, hak-hak wanita, kesehatan dan keselamatan kerja). Contoh LSM ini adalah forum-forum LSM dan gerakan-gerakan yang terdiri dari berbagai LSM. Tujuan didirikan organisasi payung ini untuk menyatukan atau mensinergikan kekuatan berbagai organisasi sehingga memperkokoh daya advokasi mereka serta meluaskan wawasan.

Selain itu terdapat Ormas dan LSM yang bergerak di bidang pemberdayaan. Mereka bekerja secara langsung di tengah-tengah masyarakat dan melakukan pemberdayaan secara langsung misalnya melalui program edukasi. Mereka fokus pada aspek yang lebih spesifik seperti penyediaan air bersih, aktivitas ekonomi, meningkatkan literasi, pendidikan dewasa dan non-formal untuk melawan kemiskinan dan ketidakadilan. Ormas dan LSM yang bergerak di bidang pemberdayaan sosial. Jenis Ormas/LSM ini memfokuskan diri pada faktor-faktor yang menghambat komunitas. Mereka meyakini bahwa kesadaran orangorang dan keterlibatannya dalam pembangunan akan membawa dampak yang signifikan bagi perbaikan kehidupan masyarakat. Mereka membantu komunitas untuk merespons isuisu di sekitarnya yang mempengaruhi kehidupan mereka dan mengatasi permasalahan yang ada (Bhose 2003).

Salah satu contoh Ormas dan LSM yang membantu berbagai komunitas dan memberikan bantuan kepada komunitas adalah Yayasan Indonesia Sejahtera (YIS) yang terbentuk pada tahun 1974, YIS memberikan pelayanan kepada masyarakat yang kurang beruntung di berbagai wilayah Indonesia dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup masyarakat. YIS memberikan pelayanan meliputi kesehatan masyarakat, pengembangan ekonomi masyarakat, pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan sumber daya manusia, pengembangan lembaga lokal, pertanian yang ramah lingkungan dan pembangunan perdamaian. YIS tidak hanya bekerja secara sendiri tetapi banyak pihak yang terlibat dalam pemberian dana bantuan, seperti Christian AID, The United Nations Children's Fund (UNICEF), United States Agency for International Development (USAID), The Evangelischer Entwicklungsdienst (EED) Germany, Hivos, The United Nations Development Programme (UNDP), New Zealand Aid (NZAID). Kiprah YIS sudah hampir 30 tahun dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, banyak lembaga yang menggunakan jasa pelayan yang diberikan oleh YIS di antaranya World Vision International (WVI), Church World Service (CWS), Catholic Relief Services (CRS), Christian Children's Fund (CCF), CARE International, Misereor, Oxfam International, Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ), The Australian Government Overseas Aid Program (AusAID), United States Agency for International Development (USAID), Depkes, Bappenas, dan lain sebagainya (www.vis.or.id, 1974).

Sebagai organisasi yang mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan

Ormas/LSM senantiasa ikut menumbuhkembangkan jiwa dan semangat serta memberdayakan masyarakat dalam bidang pembangunan, ini merupakan salah satu fungsi utama dari pembentukan organisasi sipil itu sendiri. Kerjasama pemerintah dengan Ormas dan LSM dalam peningkatan partisipasi pemilih dinilai sangat strategis. Misalnya di saat Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) bekerja sama dengan Ormas dan LSM dalam menggelar sosialisasi penyelenggaaraan pemilu dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih untuk memberikan hak suaranya pada pemilu. Dengan kekuatan massa dan kedekatan dengan masyarakat, peran Ormas dan LSM dianggap efektif dalam meningkatan partisipasi pemilu berdasarkan prinsip demokrasi yang bersih dan adil. Ormas

dan LSM juga membantu menyediakan informasi seputar pemilu dan kandidat sehingga meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang calon kandidat yang akan dipilihnya.

Sebagai organisasi yang mengawasi proses pembangunan

Ormas dan LSM dapat berperan dalam mengawasi proses pembangunan. Dalam upaya membangun pemerintahan yang responsif terhadap tuntutan masyarakat, LSM juga turut terlibat dalam dialog-dialog dengan birokrasi pemerintah dapat mengakomodasi tuntutan masyarakat. Pemerintah kemudian dapat meneruskan tuntutan tersebut dalam kebijakannya. Akan tetapi, peran Ormas/LSM tidak hanya sampai di situ. Mereka juga dapat turut mengawal dan mengawasi implementasi kebijakan demi tercapainya tuntutan masyarakat. Peran Ormas/LSM yang demikian turut menciptakan pemerintahan yang sesuai dengan prinsip keterbukaan dan dapat dipertanggungjawabkan.

LSM ikut melaksanakan, mengawasi, memotivasi dan merancang proses dan hasil pembangunan secara berkesinambungan, semenjak program itu dilaksanakan hingga berakhirnya program tersebut. Dalam hal ini LSM dapat memberikan penyuluhan langsung kepada masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam pembangunan. Sebagai pengawasan pembangunan dengan asas keterbukaan, kepercayaan, akuntabilitas, kontrol sosial, dan harmonisasi. Kontrol sosial oleh LSM wujud dari kesadaran masyarakat akan pentingnya partisipasi masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Seperti dalam pemberian bantuan kepada warga oleh pemerintah, LSM dapat ikut memantau supaya bantuan dapat tersalurkan dengan baik dan tanpa kecurangan atau perbuatan korupsi.

Hak Ormas dan LSM dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanan pemenuhan kebutuhan hak dan pelayanan yang diberikan kepada warga telah diatur dalam Keppres No. 74 tahun 2001 pasal 16 (1) Masyarakat melakukan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui: a) pemberian informasi adanya indikasi terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Pemerintah Daerah maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; b) penyampaian pendapat dan saran mengenai perbaikan, penyempurnaan. Pengawasan tersebut tentunya berbentuk sebagai Ormas dan LSM ataupun individual.

LSM yang melakukan pengawasan terhadap pemerintah adalah Indonesian Corruption Watch (ICW). ICW adalah salah satu organisasi yang berafiliasi terhadap proses pengawasan korupsi di institusi pemerintahan. Mereka memiliki misi untuk mengintegrasikan agenda anti korupsi untuk memperkuat partisipasi rakyat yang terorganisir dalam proses pengambilan dan pengawasan kebijakan publik dan

memberdayakan aktor-aktor potensial untuk mewujudkan sistem politik, hukum, ekonomi dan birokrasi yang bersih korupsi dan berlandaskan keadilan sosial dan gender (ICW 2010). Dengan misi tersebut sudah banyak pengawasan yang dilakukan oleh ICW diantaranya pemilihan rektor yang terindikasi 12 modus dalam sektor pendidikan.

ICW melakukan pengawasan secara terencana, ekslusif dan sangat kredibilitas. Mengingat ICW adalah bukan lembaga pemerintahan maka efektifitasnya sangat dipengaruhi oleh kualitas anggota dan sumber daya yang dimiliki, sebab jalur yang paling efektif yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk melakukan pengawasan yaitu dengan jalur non pemerintahan (Wibowo & Cahyat 2005). Salah satu contoh adalah laporan audit independen yang dilakukan oleh ICW pada pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009, yang standar auditing yang diterapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (ICW 2010).

Turut aktif memelihara ketertiban dan keamanan

Ormas dan LSM harus ikut aktif dalam memelihara dan menciptakan suasana yang kondusif di dalam kehidupan masyarakat, bukan sebaliknya justru membuat keadaan menjadi semakin kacau dengan tindakan atau perilaku meresahkan masyarakat. LSM sebagai wadah yang ikut aktif dalam perannya mensukseskan pembangunan serta ikut menjaga kedaulatan negara dan ketertiban sosial. Sebagai pendukung dalam menciptakan keamanan dan ketertiban. Ormas dan LSM dapat berperan sebagai juru damai dan mendukung terciptanya suasana kondusif yang dapat mengantisipasi kemungkinan konflikkonflik antarkepentingan dalam masyarakat. Mereka turut andil dalam menumbuhkembangkan kesadaran kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berorientasi pada pembangunan nasional. Ormas dan LSM harus tetap menjaga kemandirian menjadi organisasi yang mampu menjalankan peran pendorong kepentingan publik.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara dan Undang-Undang No.17 tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat, masyarakat berhak dan wajib turut serta dalam bela negara. Ormas dan LSM dapat berperan sebagai katalisator dan penggerak masyarakat dalam upaya-upaya bela negara, terlebih ketika negara dalam keadaan darurat. Beberapa organisasi sipil yang bekerja sama dengan institusi militer, terutama TNI AD, dalam rangka bela negara antara lain Forum Komunikasi Putera-Puteri Purnawirawan TNI/Polri Indonesia (FKPPI),

Angkatan Muda Siliwangi, Pemuda Panca Marga, Persatuan Purnawirawan Republik Indonesia (Pepabri), dan Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI).

Sebagai organisasi yang mengembangkan keahlian masyarakat

Ormas dan LSM juga harus ikut menggali dan mengembangkan segala potensi yang dimiliki oleh masyarakat dan anggotanya, sehingga dapat mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan bersama. Dalam hal ini sangatlah penting karena jika anggota dalam Ormas dan LSM tidak memiliki potensi sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan akan menjadikan Ormas dan LSM menjalankan fungsi yang sesungguhnya, tidak sekedar hanya ada organisasinya saja. Ormas dan LSM juga dapat meningkatkan keahlian masyarakat, misalnya ketika pemerintah BNP2TKI menggandeng LSM dalam upaya meningkatkan kompetensi dan kualitas tenaga kerja Indonesia. LSM yang bergerak dibidang pemberian dukungan menyediakan beragam fungsi dukungan kepada LSM-LSM yang bergerak di akar rumput. Mereka memberikan pelatihan kepada anggota LSM misalnya dalam aspek manajerial, kemampuan teknis, ataupun pengetahuan tentang isu-isu yang mereka geluti. Mereka memperkuat kapasitas LSM-LSM yang baru berdiri (Bhose 2003).

Salah satu contoh LSM yang turut ikut mengembangkan keahlian masyarakat adalah Bandung Creative City Forum (BCCF), yang terbentuk pada tanggal 21 Desember 2008. BCCF dalam keberadaannya di masyarakat Kota Bandung berbasis kepada kreativitas, perencanaan dan perbaikan insfrastruktur kota sebagai mendukung pengembangan perekonomian kreatif dan menciptakan wirausaha kreatif baik perorangan maupun komunitas. Dalam pembangunan dan peningkatan ekonomi kreatif BCCF sudah banyak bekerjasama dengan komunitas lain diantaranya Heler Festival tahun 2008 dan 2009, Creative Entrepreneur Network (CEN) tanggal 24 Mei 2009 di Kota Bandung, kemudian tahun 2011 BBCF bekerjasama dengan United Nations Environment Programme (UNEP) dan Kementrian Lingkungan Hidup (KLH) Indonesia, dan mensukseskan program TUNZA International Children and Youth Conference on Environment yang digelar di Gedung Sasana Budaya Ganesha Bandung dan menghasilkan Babakan Siliwangi World City Forest (bandungcreativecityforum.wordpress.com). Peran BCCF dalam pembangunan lingkungan dibuktikan dengan dukungan terhadap kawasan Babakan Siliwangi Bandung sebagai Hutan Kota Dunia yang harus di jaga. Bersama LSM-LSM lainnya Kota Bandung, mereka berjuang supaya Bandung dinobatkan sebagai kota kreatif yang bersanding dengan kota-kota kreatif di belahan dunia lainnya.

Tantangan Ormas dan LSM

Meskipun Ormas dan LSM telah menjalankan peran merancang strategi dalam pembangunan, tetapi terdapat beberapa upaya yang perlu dilakukan untuk meluruskan dan meningkatkan kinerja lembaga-lembaga tersebut, sehingga tidak keluar dari asas Pancasila. Adapun tantangan Ormas dan LSM sebagai upaya peningkatan pembangunan. Pertama, meningkatkan kerjasama dan koordinasi ormas dan LSM dengan para pemangku kepentingan lainnya, seperti pemerintah dan swasta baik di dalam negeri maupun di luar negeri sesuai dengan bidang kegiatannya yang dimiliki, tanpa ikatan yang dapat merugikan kepentingan nasional. Kerjasama dan koordinasi LSM dengan pemerintah dan swasta sangat penting untuk mempermudah LSM dalam memberikan pelatihan, pengembangan dan motivasi kepada masyarakat, terutama dalam support dana. Tetapi masih tetap dalam independensi dalam pelaksanaannya tanpa susupi oleh pihak yang memliki kepentingan.

Kedua, meningkatkan efektivitas implementasi kerjasama antarlembaga. Untuk meningkatkan eksistensinya sebagai lembaga yang kredibel, Ormas dan LSM harus mengupayakan kerjasama antarlembaga. Dengan kerjasama tersebut akan menghasilkan donor-donor yang akan membantu pendanaan. NGO harus mempunyai pengetahuan yang mendalam mengenai isu dan tantangan sektor di mana mereka bekerja, dan khususnya sektor yang sangat rentan dengan korupsi (Holloway 2006).

Perhatian ini sangat penting kepada LSM yang akan memberikan bantuan kepada masyarakat. Mengapa hal ini penting, karena LSM adalah organisasi bersih dan dipercayai oleh masyarakat sebagai organisasi yang independen. Sebagai organisasi yang mendapat dukungan penuh masyarakat, selayaknya LSM menjaga bagaimana agar organisasi mereka tidak terjerumus kedalam korupsi.

Ketiga, meningkatkan partisipasi publik. Kontribusi organisasi masyarakat sangat penting dalam mendorong proses pembangunan yang bersifat partisipatoris, tentunya peran tersebut tidak hanya sebatas konsep ataupun teori, peningkatan kesadaran akan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan masalah publik, advokasi untuk mereformasi kebijakan agar lebih kondusif terhadap partisipasi masyarakat, tetapi juga dalam mempraktekkan pendekatan pembangunan (Hetifah 2004).

Keempat, mempertahankan sikap kritis dan objektif terhadap pemerintah meskipun mereka seringkali dilibatkan dalam berbagai program pemerintah. Sebagai organisasi sipil

yang menjadi sorotan masyarakat adalah aspek independensi. Terkadang permasalahan akan muncul ketika Ormas dan LSM bekerjasama dengan pemerintah atau swasta, mereka cenderung berpihak pada lembaga-lembaga mitranya tanpa mempertahankan tindakan kritis. Penting untuk menjaga Ormas dan LSM tetap bersih karena mereka harus tetap independen dari intervensi dunia bisnis dan pemerintah (Holloway 1997). Untuk mempertahankan independensi dan sikap kritis, Ormas dan LSM harus memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) agar setiap tindakan sesuai dengan cara kerja LSM itu sendiri dan tidak ditunggangi oleh pihak yang memiliki kepentingan melenceng.

Kelima, Ormas dan LSM senantiasa meningkatkan kemampuan, keahlian, dan kapasitas baik secara organisasional maupun para personel anggotanya. Dalam meningkatkan kualitas anggota perlu dilakukan sebuah pelatihan atau melakukan evaluasi terhadap setiap kerja anggota, dengan begitu Ormas dan LSM akan memahami setiap permasalahan internal yang mereka hadapi. Di samping itu, Ormas dan LSM perlu melakukan studi banding atau bertukar pikiran dengan organisasi lain yang memiliki sistem kerja atau organisasi yang lebih canggih.

SIMPULAN

Dari uraian di atas dapat kita pahami pentingnya peran Ormas/LSM dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ormas/LSM tidak hanya menjadi penghubung dan pengimbang kekuatan rakyat berhadapan dengan negara, tetapi juga memberikan kontribusi positif sebagai mitra pemerintah dalam melaksanakan pembangunan dan upayaupaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks kehidupan sosial politik, Ormas dan LSM yang ada di Indonesia turut andil dalam menjadi stabilitas ketertiban dan keamanan, dan diharapkan ke depannya akan tetap memainkan peran tersebut sehingga dapat menopang kesatuan bangsa dan NKRI.

Eksistensi dan krediblitas menjadi tantangan sendiri bagi Ormas dan LSM dalam memberikan bantuan untuk kesejahteraan masyarakat. Mereka selayaknya berjalan sesuai dengan karakteristik organisasi yang menjadi keunggulan mereka, yaitu berintegritas, independen, kompeten, profesional, fleksibel, dan memiliki jaringan organisasi yang luas. Beberapa tantangan yang harus dihadapi Ormas dan LSM dapat dilalui dengan menguatkan dan meningkatkan sumber daya anggota untuk menciptakan efektifitas, menjaga organisasi tetap bersih dari tindak korupsi, dan peka pada setiap permasalahan yang ada di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aras, G., & Crowther, D. 2010. Destructive Creation: A Surfeit of NGOs. In Guler Aras & David Crowther (Eds.), NGOs and Social Responsibility Google Books (p. 114). United Kingdom: Emerald Books
- Bastian, I. 2007. Akuntansi untuk LSM dan Partai Politik-Google Books. Jakarta: Erlangga.
- Bhose, J. 2003. NGOs and Rural Development: Theory and Practice Joel S. G. R Bhose-Google Books. New Delhi: Concept Publishing Company.
- CARAM. 2003. BURUH MIGRAN PEKERJA RUMAH TANGGA (TKW-PRT) INDONESIA: KERENTANAN DAN INISIATIF-INISIATIF BARU UNTUK PERLINDUNGAN HAK ASASI TKW-PRT. Kuala Lumpur: Komnas Perempuan (Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan dan Solidaritas Perempuan/CARAM Indonesia).
- Fakih, M. 2000. Masyarakat Sipil untuk Transformasi Sosial: Pergolakan Ideologi LSM Indonesia. Yoyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fowler, A. 1997. "Understanding NGDOs" in "STriking a Balnce a Guide to Enhancing the Effectiveness of Non-Governmental Organisations in International". London: Earthscan.
- Hadjar, A. F. (2006, Juli 18). LSM, Demontrasi dan Demokrasi Era Reformasi. LSM, Demonstrasi dan Demokrasi (disampaikan pada Diskusi Implementasi Kebebebasan Berbicara dan Berserikat).
- Halili. 2006. "MASA DEPAN CIVIL SOCIETY DI INDONESIA: PROSPEK DAN TANTANGAN". CIVICS (Jurnal Kajian Kewarganegaraan) 3:2.
- Hetifah, J. S. 2004. Inovasi, Partispasi dan Good Governance. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Holloway, R. 2006. NGO Corruption Fighters' Resource Book How NGOs can use monitoring and advocacy to fight corruption. Genewa: The Budapest Office of the Justice Initiative of the Open Society Institute.
- ICW. 2010. Laporan Keuangan Perkumpulan IndonesiaCorruption Watch untuk tahun yang berakhir padatanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 dan Laporan Auditor Independen. Jakarta: ICW.
- Mitsuo, N. 2001. Introduction, "Islam & Civil Society in Southeast Asia (Editor: Nakamura Mitsuo, Sharon Shiddique, Omar Farouk Bajunid). Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.
- Poloma, M. 2007. Sosiologi Kontemporer. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Wibowo, S., & Cahyat, A. 2005. Masyarakat mengawasi pembangunan daerah Bagaimana agar dapat efektif? *Center for International Forestry Research*, p. Nomor 23.

Jurnal:

- Assa'di, H., Dharmawan, A. H., & Adiwibowo, S. 2009. "Indefendensi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM): di Tengah Kepentingan Donor". Jurnal Trandispli Sosiologi, Komunikasi, dan Ekologi Manusia, hlm. 231-258.Holloway, R. (1997, 10 20). International Anti-Corruption Conference (p. 1 von 15). Peru: IACC.
- Holloway, R.1997. NGOs: "Loosing the Moral High Ground-Corruption and Misrepresentation". International Anti-Corruption Conference, 1-2.
- Holloway, R. 1997. NGOs: Loosing the Moral High Ground-Corruption and Misrepresentation. International Anti-Corruption Conference.
- Holloway, R. 2006. Genewa: The Budapest Office of the Justice Initiative of the Open Society Institute.
- Nurman, A. 2012. "Global Governance Pengambilalihan Negara dan Peran LSM Lokal". Jurnal Analisis Sosial 61.
- Syaefudin, M. 2014. "REINTERPRETASI GERAKAN DAKWAH FRONT PEMBELA ISLAM (FPI)". JURNAL ILMU DAKWAH 34:2.
- UMY, B. (2016, November 30). LSM, Mitra Kritis Bagi Pemerintah . Universitas http:www.umy.ac.id/lsm-mitra-kritis-bagi-Muhamadiyah Yogyakarta, pp. pemerintah.html.
- White, G. 1994. "Civil Society, Democratization, and Development(I): Clearing the Analytic Ground". Democratization, 1(2):375-390.
- Undang-Undang, Imendagri dan Keppres:
- Intruksi Menteri Dalam Negeri (Inmedagri) No. 8 Tahun 1990 Pedoman Pelaksanaan Tentang Pembinaan Lembaga Swadaya Masyarakat.
- Undang-Undang No.17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Keppres No. 74 Tahun 2001 Tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan DaerahUndang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara.